



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-31.KP.03.04 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/563/M.SM.02.00/2020 tanggal 09 September 2020 hal Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.4-KP.03.04-80 tanggal 24 Mei 2022, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah mengikuti pelatihan dan telah lulus uji kompetensi untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Juni 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
6. Direktur Jenderal Pemasaran;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
10. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
13. Pembuat Daftar Gaji Kantor yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : SEK.2-31.KP.03.04 TAHUN 2022
 TANGGAL : 09 JUNI 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	WAHYUNING MEGA PUTRI, S.I.A. NIP. 199710022020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
2.	KRISTONDIKO SIALLAGAN, S.E. NIP. 199312182020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	0
3.	LASMAIDA TIO EVALINA PANJAITAN, S.Sos. NIP. 199209292020122002	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	0
4.	SISCA MUTIARA SARI, S.E. NIP. 199101152020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	0
5.	MIRSA OCTAVIA WARDAYANI, S.AP. NIP. 199510152020122002	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan	0
6.	NENI UCIATI, S.E. NIP. 199708042020122002	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan	0
7.	JAMES JUNIANDA SARAGIH, S.E. NIP. 199406012020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
8.	SITI NURHIDAYATI, S.Sos. NIP. 199408032020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
9.	NABILLA AULIA SHABRINA,S.E. NIP. 199511192020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
				10 . . .

1	2	3	4	5
10.	RETNO ARIYANTI, S.Sos. NIP. 199606062020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
11.	ANDIKA PRADIPTA SARAGIH, S.E. NIP. 199003132020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
12.	DWI PANGESTUTI, S.E. NIP. 199503292020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
13.	REIKY HARIANTO, S.E. NIP. 199110182020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	0
14.	DIMAS PAJAR KASIH, S.E. NIP. 199205152021011001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	0
15.	VIKE YOUDIT, S.A.N. NIP. 199307012020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	0
16.	MUHAMMAD YASIR ADI PUTRA, S.E. NIP. 199004162020121002	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	0
17.	IBRAHIM WAHYUDI, S.E. NIP. 198708092020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	0
18.	SYDIK PERMANA, S.E. NIP. 199206292020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	0
19.	ABINTA ARDHA, S.E. NIP. 199303272020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	0
20.	DEWA KADEK DARMADA, S.E. NIP. 199401202020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	0
21.	ADITYA ARLIN PAMUNGKAS, S.E. NIP. 199406132020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	0
				22 . . .

1	2	3	4	5
22.	WINDA FEBRIYANTI, S.Ak. NIP. 199702192020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	0
23.	AYU HAYATI SAFITRI, S.Ak. NIP. 199702062020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	0



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002